



UNIVERSITAS TERBUKA

Darmanto

66173

Edisi 6

BUNGA RAMPAI

FISIP-UT

2009

Hak Cipta © pada Penulis dan Dilindungi Undang-undang
Hak Penerbitan pada Penerbit Universitas Terbuka
Departemen Pendidikan Nasional
Kotak Pos 6666 – Jakarta 10001
Indonesia

Dilarang mengutip sebagian ataupun seluruh buku ini
dalam bentuk apa pun, tanpa izin dari penerbit

Edisi Ke-6
Cetakan Pertama, Agustus 2009

Penulis : *Tim Penulis FISIP-UT*

Penelaah Materi : *Tim Penulis FISIP-UT*

Desain Cover & Ilustrator : *Sunarti*

Layouter : *Eddy Purnomo*

350
BUN

BUNGA Rampai/Tim Penulis FISIP-UT-2009
Edisi Keenam, Cetakan pertama, Jakarta,
Universitas Terbuka, 2009
310 hal; ill; 21 cm
ISBN: 978-979-011-465-4

1. bunga rampai
Tim Penulis FISIP-UT-2009



Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan ridhonya jualah buku Bunga Rampai FISIP-UT edisi ke-6 dapat terbit. Buku Bunga Rampai ini seharusnya terbit satu tahun dua kali, namun karena adanya pergantian kepengurusan Bunga Rampai maka edisi ke-6 ini mengalami keterlambatan dalam penerbitannya.

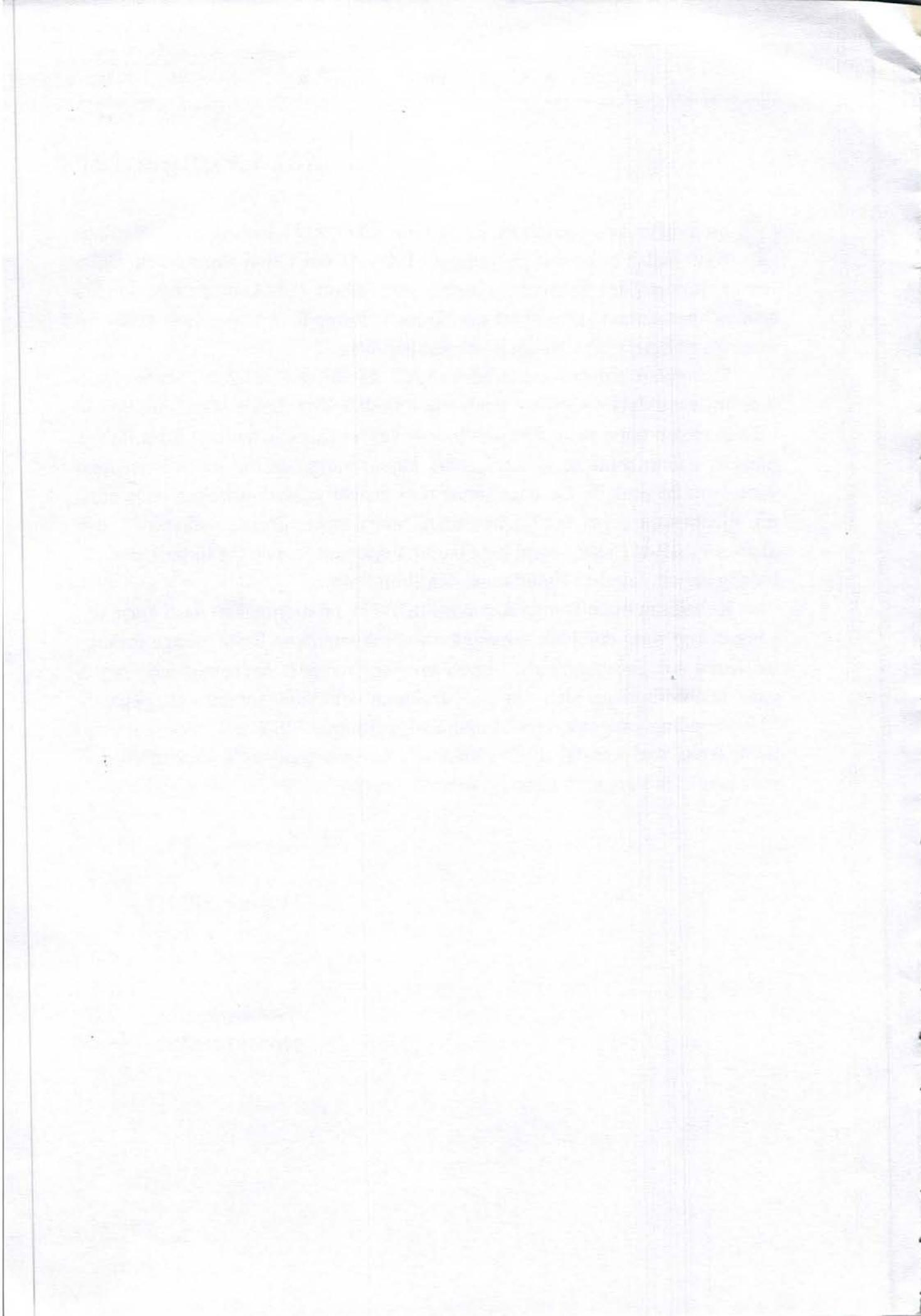
Kumpulan tulisan ini adalah hasil kajian staf edukatif yang telah diseminarkan dalam seminar akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UT. Berbagai tema yang menjadi bidang kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dibahas dalam seminar tersebut, baik kajian yang bersifat teoritik maupun yang bersifat praktik. Berbagai tema dari artikel yang diterbitkan pada edisi ini, diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi dosen, mahasiswa, dan alumni FISIP-UT saja, tetapi juga bagi masyarakat luas yang tertarik dengan bidang kajian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Kehadiran buku Bunga Rampai FISIP-UT ini merupakan hasil kerja tim yang cukup solid dan baik sehingga dapat mewujudkan Buku Bunga Rampai ini. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas semua jerih payah yang telah diberikan oleh tim ini. Meskipun demikian, seperti kata pepatah: "Tiada gading yang tak retak" buku Bunga Rampai FISIP edisi ke-6 ini tentu tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, sehingga kritik dan saran dari para pembaca sangatlah kami harapkan.

Agustus, 2009

Dekan FISIP-UT

Tri Darmayanti
NIP 131866177



Daftar Isi

Kata Pengantar

Nama Penulis Bunga Rampai

Fluency Vs Accuracy dalam Berbicara Bahasa Inggris
(Siti Era Mardiani) 1

Dilema Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
(Suryarama) 17

Market Segmentation Dalam Kebijakan Konversi Minyak Tanah
Ke LPG (Agus Santosa) 33

Pasar Tradisional Yang Semakin Tergusur (Parwitaningsih) 39

Viktimisasi, Sistem Peradilan Pidana, serta Restitusi dan/atau Hak
Bagi Korban Kejahatan (Boedhi Oetoyo) 59

Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Dalam Organisasi
Pemerintah (Darmanto) 83

Ilmu Pemerintahan Relevansinya dengan Ilmu-ilmu lainnya
(Prospektif Dalam Mengembangkan Jurusan di FISIP – UT)
(Zainul Ittihad Amin) 95

Kebijakan Pengisian Jabatan Sekdes Dari PNS: Permasalahan dan
Solusinya (Enceng) 103

Penataan Organisasi Pemerintah Daerah (Ayi Karyana) 119

Pengaruh Media Terhadap Politik dan Pengaruh Politik Terhadap
Media (Kasus David Kelly dan BBC di Inggris)
(Made Yudhi Setiani) 139

Praktik Reformasi Administrasi di Beberapa Negara (Kasus China,
Amerika Serikat, Indonesia, dan Thailand)
(F. Ratih Wulandari) 151

Feminisme dalam Demokrasi (Susanti)	161
Kajian Tentang Peningkatan Peran KORPRI dan Dharma Wanita Universitas Terbuka (Lilik Aslichati)	173
Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pemberitaan Pers (<i>Gender Hororgraphy</i>) (Ace Sriati Rachman)	187
Paradigma Baru Pola Asuh Anak: Membesarkan Anak dengan Kasih Sayang (Murni Rachmatini)	205
Menunggu Mutu Pelayanan Kelas Dunia PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia (Agus Priyanto)	217
Optimalisasi Pemanfaatan Layanan Pesan Singkat (SMS) dalam Sistem Pendidikan Jarak Jauh (Haryanto)	231
Paradigma <i>New Public Management</i> dan <i>New Public Service</i> dalam Manajemen Pelayanan Publik (F. Ratih Wulandari)	255
Pengaruh Kemampuan dan Perilaku Aparatur Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan (Studi pada Puskesmas-Puskesmas Kabupaten Tangerang) (Liestyodono B. Irianto)	267
Persepsi Masyarakat tentang Layanan Puskesmas Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (Darmanto)	287
Friksi dalam Tubuh Partai (Susanti)	297

Nama Penulis Bunga Rampai

Nama	Judul Makalah	Penyunting	Kelompok
Siti Era Mardiani	<i>Fluency Vs Accuracy</i> dalam Berbicara Bahasa Inggris	Joko Rahardjo	Bahasa
Suryarama	Dilema Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia	Tiesnawati W	HAM, Kriminologi & Sosiologi
Agus Santosa	<i>Market Segmentation</i> Dalam Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke LPG	Tiesnawati W	HAM, Kriminologi & Sosiologi
Parwitaningsih	Pasar Tradisional Yang Semakin Tergusur	Agus Santosa	HAM, Kriminologi & Sosiologi
Boedhi Oetojo	Viktimisasi, Sistem Peradilan Pidana, serta Restitusi dan/atau Hak Bagi Korban Kejahatan	Mohamad Husni Arifin	HAM, Kriminologi & Sosiologi
Darmanto	Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Dalam Organisasi Pemerintah	Ida Royandiyah	Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik
Zainul Ittihad Amin	Ilmu Pemerintahan Relevansinya dengan Ilmu-ilmu lainnya (Prospektif Dalam Mengembangkan Jurusan di FISIP – UT)	Djoko Rahardjo	Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik
Enceng	Kebijakan Pengisian Jabatan Sekdes Dari PNS: Permasalahan dan Solusinya	Ari Yuliana	Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik
Ayi Karyana	Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	Enceng	Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik
Made Yudhi Setiani	Pengaruh Media Terhadap Politik dan Pengaruh Politik Terhadap Media (Kasus David Kelly dan BBC di Inggris)	Ida Royandiyah	Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik

Nama	Judul Makalah	Penyunting	Kelompok
F. Ratih Wulandari	Praktik Reformasi Administrasi di Beberapa Negara (Kasus China, Amerika Serikat, Indonesia, dan Thailand)	Meita Istianda	Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik
Susanti	Feminisme dalam Demokrasi	Siti Aisyah	Masalah Gender
Lilik Aslichati	Kajian Tentang Peningkatan Peran KORPRI dan Dharma Wanita Universitas Terbuka	Meita Istianda	Masalah Gender
Ace Sriati Rachman	Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pemberitaan Pers (<i>Gender Hororgraphy</i>)	Mohamad Husni Arifin	Masalah Gender
Murni Rachmatini	Paradigma Baru Pola Asuh Anak: Membesarkan Anak dengan Kasih Sayang	Rosa Tosaini	Masalah Gender
Agus Priyanto	Menunggu Mutu Pelayanan Kelas Dunia PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia	Agus Santosa	Pelayanan Publik
Haryanto	Optimalisasi Pemanfaatan Layanan Pesan Singkat (SMS) dalam Sistem Pendidikan Jarak Jauh	Enceng	Pelayanan Publik
F. Ratih Wulandari	Paradigma <i>New Public Management</i> dan <i>New Public Service</i> dalam Manajemen Pelayanan Publik	Agus S.	Pelayanan Publik
Liestyodono B. Irianto	Pengaruh Kemampuan dan Perilaku Aparatur Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan (Studi pada Puskesmas-Puskesmas Kabupaten Tangerang)	Ari Yuliana	Pelayanan Publik
Darmanto, dkk	Persepsi Masyarakat tentang Layanan Puskesmas Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Rosa Tosaini	Pelayanan Publik
Susanti	Friksi dalam Tubuh Partai	Siti Aisyah	Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik

Praktik Reformasi Administrasi di Beberapa Negara (Kasus China, Amerika Serikat, Indonesia dan Thailand)

Dra. F. Ratih Wulandari, M.Si.
Penyunting: Dra. Meita Istianda, M.Si.

Latar Belakang

Dalam sistem administrasi negara di berbagai negara, penyediaan layanan publik, sering kali menjadi permasalahan yang bersifat makro dan laten. Oleh sebab itu, perlu penanganan dan tindakan pemerintah yang lebih serius. Pada hakikatnya, pemecahan masalah-masalah administrasi publik yang menyangkut layanan publik, perlu dimulai dan diciptakan dari tahap penetapan visi dan misi pemerintah masing-masing negara. Artinya, perlu program mendasar dan khusus dari pemerintah untuk menangani masalah-masalah administrasi negara.

Adanya kasus kematian balita akibat busung lapar, demonstrasi penggusuran tempat tinggal dan ruang usaha liar di perkotaan, meningkatnya kuantitas dan kualitas pengangguran intelektual, terbengkalainya program penanganan gizi buruk dan pengentasan kemiskinan, telah menyiratkan sederet contoh kasus penyediaan layanan publik yang tidak maksimal di sejumlah negara, dan penyelenggaraannya tidaklah lepas dari sistem administrasi negara pada masing-masing negara. Kondisi tersebut diperburuk dengan adanya praktik *pathology bureaucracy* dan pengkhianatan moral (*moral hazard*) oleh beberapa oknum birokrat, yang menstimuli atau terstimuli kejahatan bisnis para pelaku bisnis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. Akibatnya, terjadi kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme yang sistematis dalam praktik administrasi negara terutama pada aspek penyediaan layanan publik. Praktik *pathology bureaucracy* menjadi sulit untuk diberantas secara tuntas. Mayoritas korban praktik *pathology bureaucracy* adalah masyarakat kebanyakan (*grassroots*) yang menjadi pengguna layanan publik tersebut.

Untuk itu, penyediaan layanan publik perlu dibenahi atau direformasi. Reformasi layanan publik menjadi salah satu wujud dari reformasi administrasi. Reformasi administrasi sebagai tuntutan untuk perbaikan sistem administrasi negara yang berkelanjutan dalam konteks modernisasi secara kontekstual masing-masing negara.

Namun dalam perjalanannya, tantangan dan masalah yang menghadang pelaksanaan reformasi administrasi dan layanan publik, menyangkut pada reliabilitas dan validitas perencanaan taktis dan teknis masing-masing negara. Untuk itu, sebagai contoh pelaksanaan reformasi administrasi, akan diketengahkan praktik reformasi administrasi pada negara China, Amerika Serikat, Thailand, dan Indonesia.

Tinjauan Teoritis

Reformasi administrasi (*administrative reform*) dikemukakan oleh Caiden (1969:8), sebagai: "*the artificial inducement of administrative transformation against resistance*". Dari pengertian tersebut maka reformasi administrasi merupakan suatu upaya sengaja perubahan besar pada sistem administrasi untuk mengatasi hambatan. Oleh sebab itu perlu strategi, yang berperan sebagai *megapolicies*, yang mencakup tujuan reformasi, batasan ruang lingkup reformasi termasuk skala reformasi, skala waktu, penyelesaian konflik, kelompok-kelompok yang terlibat dalam reformasi, dasar teori dan asumsi-asumsi kondisi masa yang akan datang. Reformasi administrasi berusaha memasukkan ide-ide baru untuk kepentingan pengembangan kapasitas (*capacity building*) sehingga memerlukan strategi baru. Salomo (2006:87) juga menegaskan bahwa reformasi administrasi publik sebagai berikut.

"perubahan yang terjadi dalam sistem administrasi publik yang dilakukan secara sengaja, bersifat fundamental atau radikal, terhadap sejumlah dimensi pemerintahan, mencakup sejumlah aspek dan dapat terjadi pada beberapa tingkat pemerintahan serta mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu, reformasi administrasi publik haruslah direncanakan secara baik dan berhati-hati serta dengan menggunakan strategi."

Adapun kesuksesan reformasi harus didahului atau didampingi dengan perubahan dalam budaya dan nilai-nilai yang berlaku umum, yang mewadahi dan mengasimilasi reformasi. Seperti yang dikatakan oleh Birkhead (dalam Caiden, 1969) bahwa:

“Successful reforms needed to be preceded or accompanied by changes in the common culture and values that permit the accommodation and assimilation of reform. ...it may possible that “administrative reform is successful only associated with major social, political or economic reform. It is doomed to failure when undertaken for its own sake, for traditional rationale or efficiency or economy.”

Lebih lanjut, dijelaskan oleh Caiden (1969:35), bahwa reformasi (administrasi) pada institusi, mencakup aspek, antara lain:

1. *Decision-making: adopting devices to improve policymaking, forecasting, programming, budgeting, planning, information processing, performance evaluation, coordination, control, resource allocation, deployment.*
2. *Structural arrangements: designing new organizations and institutions, formal working codes, laws physical layout, communications, authority patterns.*
3. *Procedures: changing methods, processes, techniques, routes, functions, roles, contacts, controls, factor mix.*
4. *Communications: reappraising images, decisions, information, standards, results, events, norms, leadership, values, motivation, behavior, policies, power relationships.*
5. *Adaptability: providing for environmental changes, research, innovation, accidents, breakdowns, delays, failures, crises, abnormalities, transformations.”*

Reformasi administrasi pelayanan publik memiliki ruang lingkup seperti halnya reformasi administrasi publik. Menurut Prasojo (2007:7), reformasi birokrasi menyangkut tiga fokus reformasi birokrasi, yakni:

- a. *Programmatic reform*, yang menyangkut program pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat atau publik, bersifat "hulu" berkaitan dengan *content* mutu (layanan publik). Kendala dalam *programmatic reform* adalah tidak dapat terus menerus meraih *quick win* dari

masyarakat dan program yang dilakukan harus sesuai urutan. Di dalamnya menyangkut perubahan sistem di mana perubahan sistem memegang peranan sangat penting dalam merubah budaya.

- b. *Procedural reform*, yang mengutamakan pembaharuan prosedur pelayanan.
- c. *Managerial reform*, bersifat *technical* yang ditujukan untuk manajemen aset, keuangan dan kepemimpinan.

Tujuan dari reformasi pelayanan adalah memproduksi (*manufacturing*) kualitas dan kualitas pelayanan. Hal tersebut dilakukan melalui strategi *downsizing* dan *rightsizing* organisasi layanan publik yang berpengaruh dalam layanan publik.

Pembahasan

Praktik reformasi pelayanan publik menunjukkan karakteristik yang unik dan khas tiap-tiap negara, dengan hasil yang berbeda-beda sehingga menarik untuk dijadikan bahan studi lanjut dan perbandingan.

A. REFORMASI ADMINISTRASI DI CHINA

Aufrecht dan Bun pada tahun 1995 membuat penelitian tentang reformasi dengan karakteristik orang China dalam konteks reformasi pelayanan publik negara China ("*Reform with Chinese Characteristics: The Context of Chinese Civil Service Reform*"). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa reformasi pelayanan publik di China dilakukan dengan cara: (1) seleksi terhadap pegawai negeri sipil atau swasta berdasarkan profesionalisme atau *merit-based selection*; (2) tidak menghilangkan semua nilai tradisional terutama ajaran filosofi konfusianisme sebab ada filosofi konfusianisme (*confucian filial loyalty*) yang hampir sama dengan filsafat marxis, yaitu sama-sama patuh atau mengikuti aturan hukum; (3) reformasi dilakukan dengan tujuan untuk mengeliminasi duplikasi struktur birokrasi yang telah terjadi; (4) reformasi terhadap pasar telah menurunkan ketergantungan ekonomi dan sosial pada serikat pekerja dengan menawarkan jaringan (*guanxi*). (Aufrecht and Bun, 1995:181)

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Tsao dan Worhtley pada tahun 1995 dengan judul "*Chinese Public Administration: Change with Continuity during Political and Economic Development*". Penelitian ini menemukan bahwa China mengalami usaha reformasi administratif secara luas pada pemerintahannya dengan fokus pada usaha mereformasi struktur administrasi selama berlangsungnya perubahan politik dan ekonomi, khususnya pada sistem pelayanan publik. Reformasi sistem pelayanan masyarakat di China dilakukan dengan cara: (a) proses diskusi, konsultasi dan negosiasi yang dibangun secara sistemik untuk menciptakan reformasi, (b) membedakan dengan tegas antara pejabat karir dan politik (seperti sistem Amerika Serikat) dan ketentuan-ketentuan *affirmative action* pada reformasi di China walaupun beberapa dirujuk dari sistem pelayanan masyarakat Amerika Serikat. China melakukan reformasi administrasi publik melalui dua cara, yaitu proses restrukturisasi kelembagaan dan perang terhadap korupsi. (Tsao and Worhtley, 1995:173-174).

Penelitian berikutnya tentang peluang dan kesempatan reformasi administrasi publik di era baru (*Challenges and Opportunities: Reform of China's Public Administration in the New Era*) oleh Wu pada tahun 2001. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa reformasi di China telah dimulai sejak tahun 1988. Fokus reformasi di China menyangkut reformasi struktur pemerintahan, reformasi sistem sumber daya manusia dan reformasi regulasi fiskal, keuangan dan desentralisasi pengendalian perekonomian serta akses informasi yang diperluas dan diberdayakan kepada pelayanan publik. Upaya-upaya tersebut bertujuan meningkatkan fungsi administrasi publik pada kualitas pelayanan publik, yang diharapkan semakin baik. (Wu, 2001: 1-6).

B. PRAKTIK REFORMASI ADMINISTRASI DI AMERIKA SERIKAT

Penelitian berikutnya tentang "Pembaharuan Pemerintahan Di Negara-Negara Bagian Amerika Serikat atau *Reinventing Government in the Americas States: Measuring and Explaining Administrative Reform* oleh Brudney, Hebert dan Wright pada tahun 1999. Temuannya adalah kebijakan

pembaharuan pemerintahan Amerika Serikat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep *reinventing government*. Temuan yang di luar perkiraan, adalah fakta bahwa pimpinan lembaga yang konservatif justru lebih melakukan pembaharuan dibanding dengan pimpinan lembaga yang liberal. Selain itu, hasil temuan menunjukkan bahwa administrator berperan penting dalam proses pengambilan keputusan sehingga berkorelasi positif dengan implementasi pembaharuan. (Brudney, Hebert dan Wright, 1999:28).

C. PRAKTIK REFORMASI ADMINISTRASI DI THAILAND

Di Thailand, gerakan *Thaksinomic* adalah gerakan reformasi administrasi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin. Thaksin melalui kebijakan *neoliberalisme*-nya, yang dikenal sebagai *thaksinomics* *Thaksinomics* merupakan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Thaksin sejak tahun 2001, yang menekankan negara adalah perusahaan, perusahaan adalah negara (*a company is a country, a country is a company*), memperlakukan negara dan tata pemerintahan berbasis model pengelolaan perusahaan, yang kemudian justru menjadi bumerang bagi kinerja pemerintahannya. (Kompas, Rabu, 27 September 2006, hal. 7).

Pada perjalanannya, gerakan *Thaksinomic* mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut menyangkut, cara dan mekanisme reformasi administrasi yang tidak menyeluruh, seperti yang pernah dicetuskan dalam teori reformasi administrasi menurut Caiden (1969). Selain itu, di Thailand, reformasi administrasi dianggap kurang berpihak pada rakyat banyak masalah-masalah kultur masyarakat yang mendasar (terkait HAM dan gagalnya pemberdayaan ekonomi rakyat).

D. PRAKTIK REFORMASI ADMINISTRASI DI INDONESIA

Untuk kasus di Indonesia, telah dilakukan pula penelitian (disertasi) tentang reformasi administrasi pemerintahan subnasional Indonesia yang berjudul *Scenario Planning Reformasi Administrasi Pemerintah Subnasional di Indonesia: Sebuah Grand Strategy Menuju Tahun 2025* oleh Roy Valiant Salomo (8900310096) pada tahun 2006. Penelitian ini menemukan bahwa

kondisi dan situasi administrasi pemerintahan subnasional Indonesia masih belum ke tahap masyarakat yang modern (meminjam istilah Riggs sebagai birokrasi model Sala dan ekonomi *bazaar-canteen*), sehingga reformasi administrasi pemerintahan subnasional masih harus meniti jalan yang panjang, jika tidak ada *political will* Pemerintah Pusat untuk benar-benar melakukan desentralisasi yang demokratis (yang bukan melimpahkan begitu saja dana dan masalah baru bagi pemerintah subnasional) dan *scenario planning* reformasi administrasi pemerintahan subnasional Indonesia yang tepat sesuai konteks lingkungan dan karakter Indonesia sebagai bangsa, negara dan tanah air.

Berikut ini beberapa kesimpulan penelitian Salomo (2006:346-351):

“...potret administrasi pemerintahan subnasional masih mengacu pada paradigma birokrasi besar yang masih bersandar pada pola weberian (*rule driven*) tetapi politik lokal sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme seperti Sala Model-nya Riggs, adanya politik alokasi anggaran departemen di tingkat pusat terhadap daerah sehingga pemerintah daerah 'dipaksa' menerima limpahan pegawai Pemerintah Pusat yang mengakibatkan membengkaknya birokrasi pemerintah subnasional, *civil service* yang jauh dari sistem merit yang kenyataannya belum terbangun sistem merit yang baik, belum kompetennya Pemerintah Daerah dalam membuat peraturan daerah yang baik, telah diterapkannya sistem penganggaran berbasis kinerja tetapi belum didukung *strategic management* yang handal, KKN dan kultur birokrasi yang merusak usaha menyejahterakan masyarakat, kinerja pelayanan publik yang mengalami perubahan (semakin baik) namun secara umum memperhatikan secara kualitas (kultur birokrasi yang tidak kondusif) dan kuantitas (akses)...Reformasi administrasi publik pemerintah subnasional memerlukan *strategy context* yang tepat, *enlightment political leader* dan *reform-minded administrator* akan menjadi masalah besar bagi Indonesia dalam reformasi administrasi. Ruang lingkup reformasi administrasi mencakup pemberantasan KKN, modernisasi sistem *civil service* dan *capacity building* pada aspek sumber daya manusia; redesain kelembagaan yang tidak saja berkaitan dengan tujuan efisiensi, tetapi juga dalam konteks meningkatkan efektivitas birokrasi dalam pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan penyediaan pelayanan publik, dan pengawasannya serta dalam konteks membangun budaya baru birokrasi ke arah profesionalisme dan pelayanan publik....”

Penelitian (disertasi) tentang reformasi dengan konteks Indonesia, dilakukan oleh Unifah Rosyidi pada tahun 2007 dengan judul "Reformasi Administrasi Subnasional: Suatu Analisis Reformasi Administrasi Kecamatan di Bogor". Temuan penelitian ini mencakup pemerintahan subnasional, pada tingkat kecamatan dan pada tingkat individu. Temuan penelitian pada pemerintahan subnasional, dikemukakan oleh Rosyidi (2007:273-276), antara lain: (1) prinsip ramping struktur kaya fungsi masih sebatas wacana, sebab penetapan bentuk dan besaran struktur selalu dipilih pada jumlah maksimal dan bukan pada karakter situasi dan kondisi daerah sehingga menjadi tidak efektif dan efisien; (2) pelimpahan dari Walikota kepada Camat mencerminkan delegasi tugas dan wewenang yang positif tetapi belum didukung dengan pelimpahan pembiayaan dan personil yang memadai; (3) adanya persepsi pelimpahan wewenang kepada kecamatan, tidak bernilai ekonomis. Adapun temuan pada tingkat kecamatan (Rosyidi, 2007:273-276), antara lain: (1) ada konflik kepentingan dengan dinas dan UPTD sehingga koordinasi menjadi lemah; (2) reformasi administrasi pada tingkat kecamatan belum signifikan, salah satunya disebabkan oleh rekrutmen Camat yang subjektif. Berikutnya, temuan pada individu (Rosyidi, 2007:278-281), antara lain: (1) kualifikasi pendidikan aparat kecamatan adalah sekolah menengah atas yang tidak ditunjang oleh pelatihan dan pendidikan kerja pelayanan publik yang memadai sehingga secara keseluruhan profesionalisme kerja aparat rendah; (2) komitmen kerja yang setengah hati sebab belum ada insentif dan *capacity building* yang memadai.

E. SIMPULAN

Praktik reformasi administrasi pada beberapa negara ada yang berhasil dalam proses dan *output*-nya, namun ada yang belum berhasil bahkan ada yang gagal. Karakteristik lingkungan internal dan eksternal negara-negara yang melakukan reformasi administrasi sangat berpengaruh terhadap perjalanan dan keberlanjutan program reformasi administrasi.

Keberhasilan maupun kegagalan dalam praktik reformasi administrasi layanan publik, bukan semata-mata disebabkan oleh kondisi maju atau tidaknya suatu negara, melainkan lebih pada konsistensi dan komitmen jelas

seluruh komponen negara-negara yang bersangkutan, termasuk kesiapan budaya dan nilai-nilai yang mendukung perubahan ke arah yang lebih baik, dalam melakukan reformasi administrasi termasuk reformasi layanan publik. Reformasi layanan publik juga perlu berorientasi pada proses dan hasil demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan sebagian elit politik atau pemerintah yang berkuasa saja saat itu. Keberhasilan praktik reformasi administrasi di dukung oleh adanya *megapolicies* pemerintah dalam berbagai bidang dan kultur masyarakat yang memihak pada kepentingan bersama secara kontekstual, secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aufrecht, Steven E. and Li Siu Bun. "Reform with Chinese Characteristics: The Context of Chinese Civil Service Reform". *Public Administration Review*; Mar/Apr 1995; 55,2; pg.175.
- Brudney, Jeffrey L., E. Ted Hebert and Deil S. Wright. "Reinventing Government in the Americas States: Measuring and Explaining Administrative Reform". *Public Administration Review*; Jan/Feb 1999; 59,1; pg.19.
- Caiden, Gerald E. (1969). *Administrative Reform*. Chicago:Ellen Lane-The Penguin Press.
- Prasojo, E. (2007). *Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik*. Depok: FISIP UI-Departemen Ilmu Administrasi. *Tidak dipublikasikan*.
- Rosyidi, U. (2007). *Reformasi Administrasi Subnasional: Suatu Analisis Reformasi Administrasi Kecamatan di Kota Bogor*. Disertasi. Jakarta: Program Doktor-Departemen Ilmu Administrasi, FISIP-Universitas Indonesia.

Salomo, Roy Valiant. (2006). *Scenario Planning Reformasi Administrasi Pemerintah Subnasional di Indonesia: Sebuah Grand Strategy Menuju Tahun 2025*. Disertasi. Jakarta: Program Doktor-Departemen Ilmu Administrasi, FISIP Universitas Indonesia.

Tsao, King K. and John Abbot Wortley. "Chinese Public Administration: Change with Continuity during Political and Economic Development". *Public Administration Review*; Mar/Apr 1995;55,2;pg.169.

Wu, Wu Wen. "Challenges and Opportunities: Reform of China's Public Administration in the New Era". *Asian Review Of Public Administration*; Jan-Jun 2001;XIII,1.